

## DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kesehatan RI. Pengertian NAPZA. Jakarta: DepKes RI; 2003.
2. Badan Narkotika Nasional RI. Tingkat Pemakaian NAPZA. Jakarta: BNN RI; 2012.
3. Badan Narkotika Nasional RI. Angka Prevalensi Pecandu Narkoba. Jakarta: BNN RI; 2014.
4. Badan Narkotika Nasional RI. Angka Prevalensi Pecandu NAPZA. Jakarta: BNN RI; 2011.
5. Joko P. Hindari NAPZA. Surakarta: Mediatama; 2007.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tentang Narkotika. 2009.
7. Badan Narkotika Nasional RI. Dampak Negatif Kecanduan NAPZA. Jakarta: BNN RI; 2013.
8. Alie S. Program Rehabilitasi Korban Narkoba. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. 2004;2.
9. Yohanes K. Rehabilitasi Remaja Pecandu NAPZA di Instalasi Wisma Sirih Sungai Bangkong Pontianak. Pontianak: Universitas Tanjung Pura; 2013.
10. yanny D. Narkoba Pencegahan dan Penanganannya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia; 2001.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tentang Narkotika. 1997.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5. Tentang Psikotropika. 1997.
13. Soekrama d. Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba. Jakarta: Yayasan Purna Bhakti Negara; 1999.
14. Anonim. Pengobatan Narkoba. 2007 [cited 2015 19 November].
15. Husin A, B. Penatalaksanaan Mutakhir dan Komprehensif Ketergantungan Napza, Cermin Dunia Kedokteran No.1362002.
16. Badan Narkotika Nasional RI. Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba. Jakarta: BNN RI; 2005.
17. Departemen Kesehatan RI. Pengertian Rehabilitasi. Jakarta: DepKes RI; 2002.
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan. 2012.

19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan. 2014.
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415. Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 2011.
21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26. Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. 2012.
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/MENKES/SK/III/2010. Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA. 2010.
23. Badan Narkotika Nasional RI. Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penyalahgunaan NAPZA. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI; 2011.
24. Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Putra; 2010.
25. Notoatmodjo S. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta; 2003.
26. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2009.
27. Satori Da. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2010.
28. Rumah Sakit Jiwa Prof H.B Saanin Padang. Profil Rumah Sakit Jiwa Prof H.B Saanin Padang,. Padang: RSJ Prof H.B Saanin Padang; 2015.
29. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 2015.
30. Rumah Sakit Jiwa Prof H.B Saanin Padang. Laporan Tahunan Instalasi NAPZA RSJ prof H.B Saanin Padang. Padang: RSJ Prof H.B Saanin Padang; 2015.
31. Muninja G. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran; 2004.
32. Siagian S. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara; 2007.